
PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL (Suatu Alternatif Pembangunan Ekonomi Rakyat)

Kausar)*

Abstract : This paper aims to look at the empowerment of the informal sector as an alternative to the economic development. Many problems faced by Indonesian people associated with the policy of economic regulation, especially the prices always go up and not affordable by the community. Thus, alternative economic development of the people become a rational choice to always be developed.

Keyword : *empowerment, informal sector, community economy*

PENDAHULUAN

Pasca reformasi tahun 1998 seluruh komponen masyarakat Indonesia merasakan betapa kehidupan ekonomi menjadi begitu sulit di tengah-tengah euporia politik yang semakin hiruk-pikuk. Tidak terbayangkan sebelumnya kehidupan ekonomi dirasakan semakin lama terasa semakin berat dipikul masyarakat kelas bawah. Mengingat telah sekian lama rakyat negeri ini terbuai dengan kemegahan-kemegahan fisik dan cerita sukses dari pelaksanaan pembangunan.

Konsep perencanaan pembangunan yang ditawarkan oleh rezim Orde Baru, yaitu mengingat basic dari kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia ada di sektor informal (pertanian dan usaha kecil) maka industrialisasi yang dijalankan tetap bertolak dan berpijak dari sektor basic di bidang pertanian dan usaha kecil menengah. Dengan konsep seperti ini, maka diharapkan

industrialisasi tersebut berhasil maka sektor informal (pertanian dan usaha kecil) yang pertama menikmati keuntungan dari industrialisasi tersebut. Hal ini dengan harapan karena sebagian besar masyarakat Indonesia sangat tergantung kehidupannya pada sektor tersebut.

Namun demikian, dalam perkembangan aplikasi dari konsep tersebut selanjutnya di tengah jalan di "plintir" akibat adanya benturan ide tentang strategi industri yang akan dijalankan. Tragisnya hal tersebut sarat dengan kepentingan-kepentingan politik antara pengambil kebijakan (penguasa) dengan para pelaku dunia usaha (pengusaha) yang kuat dengan nuansa manipulatif dan kolusif yang telah mendarah daging. Hal inilah yang menyebabkan terpuruknya perekonomian nasional yang akhirnya melahirkan terjadinya krisis ekonomi. Disamping itu, juga terdapat faktor-faktor lainnya yang juga ikut mempengaruhi terjadinya krisis ekonomi di bumi pertiwi ini.

*) Dosen Fakultas Pertanian Universitas Riau

Kondisi Sektor Informal Indonesia

Kegagalan dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya pada lapisan *grassroot* yang merasakan efek langsung dari keterpurukan ekonomi. Dalam konteks Indonesia kontemporer saat ini kondisi yang sangat memprihatinkan ditambah lagi pemerintah mengambil kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan BBM, TDL dan tarif telepon menambah semakin runyamnya kondisi masyarakat Indonesia. Dimana di saat kondisi ekonomi masyarakat banyak belum stabil dan tingkat pendapatan dan kemakmuran rakyat yang sangat memprihatinkan seperti saat ini. Justru semakin menambah seaksarnya kehidupan rakyat yang selalu mengalami penindasan oleh negara. Sementara itu, dalam hal berusaha dan bekerja masyarakat banyak yang mengalami kehilangan lapangan kerja akibat dari kegagalan dalam menerapkan konsep pembangunan yang selalu bertumpu pada sektor industri besar dan di bidang jasa yang dibangun oleh Rezim Orde Baru banyak salah kaprah..

Keberadaan sektor informal sangat penting dalam menghidupkan perekonomian di sebuah negara, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal yang sangat aneh apabila realitas ekonomi yang kasat mata tersebut dalam peranannya sangat besar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian oleh negara, yang lebih mementingkan ekonomi yang berskala makro dengan berkolaborasi dengan para pengusaha besar (konglomerat) dengan dukungan modal yang besar yang selalu mendapat perhatian dengan peminjaman modal dan

proteksi oleh negara.

Seperti dikatakan oleh John Friedmann (1992; 33) perlu adanya pendekatan penyadaran transformatif terhadap pemaknaan sektor informal tersebut terhadap realitas kehidupan ekonomi, seperti tiadanya modal, rendahnya keterampilan dan kurangnya akses terhadap pasar serta kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Maka tidaklah mengherankan bahwa keberadaan sektor informal dalam konteks negara Indonesia saat ini masih menjadi kendala dalam perkembangannya karena kurang mendapat perhatian yang optimal oleh penyelenggara negara. Pada hal sektor informal tetap eksis, di saat badai krisis melanda Indonesia dimana pada saat ini justru industri-industri berskala modal besar justru tidak kuat mengalami kendala moneter dan globalisasi perdagangan internasional.

Konsep Sektor Informal dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Keith Hart yang mempopulerkan konsep “konsep sektor informal” sebagai suatu realitas yang tidak terhindarkan dari wilayah perkotaan. Digambar bahwa sektor formal sebagai bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang tidak terorganisir (Jan Breman, 1991; 138).

Dalam konteks Indonesia bentuk sektor informal yang banyak ditemui adalah meliputi usaha-usaha di bidang pertanian, misalnya buruh tani, peternakan kecil. Bentuk lain sektor informal adalah dibidang suaha kecil, seperti pedagang eceran (pemilik warung), pedagang kaki lima (PKL), pemilik bengkel sepeda, pemulung,

penarik becak, dan lain-lain umumnya di daerah perkotaan. Jenis-jenis usaha seperti ini yang merupakan basic langsung sebagai sumber ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak mendapat perhatian oleh pemerintah. (Magdalena Lumban, 1991; 45).

Ketidakberpihakan pemerintah pada sektor informal ini terlihat dari tidak adanya perhatian pada kelayakan usaha, seperti modal, pembukuan, keterampilan, pemasaran, perencanaan usaha dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan pelaku sektor informal termarginalisasi, ketika ada masalah tidak ada bantuan dari pemerintah sehingga dapat menyebabkan pelaku sektor informal jatuh miskin. Lebih dari itu, selama ini keberadaannya sering dianggap ilegal oleh pemerintah dan tidak ada perlindungan dan proteksi hukum untuk usaha mereka.

Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang untuk mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan politik bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak terelakkan kalau menginginkan pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dikehendaki. Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi politik, tetapi karena berbagai hal suara mereka terpendam dalam struktur yang beku. Agar mereka dapat lepas dari problem kemiskinan ekonomi maka pemberdayaan politik diperlukan sehingga mereka mampu bersuara dalam struktur politik sehingga mampu merubah nasibnya. Semakin tinggi akses politik yang dimiliki oleh

lapisan miskin maka akan semakin tinggi pula akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnya diharapkan mereka dapat mandiri dalam mengatasi problema kemiskinan yang mereka hadapi. (Heru Nugroho, 2001; 201).

Pemberdayaan masyarakat harus dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental. Pada pengertian pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumberdaya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Pada pendekatan yang kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata (Wrihatnolo dan Dwidjowidjoto, 2007).

Menurut Rahayu (2006), pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya, yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material, dan fisik, sampai kepada aspek manejerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan.

Konsep pemberdayaan akan lebih mudah dipahami bila kita mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang berdaya tersebut. Esensi pemberdayaan tersebut adalah proses perolehan kekuasaan (*achieving power*) dan segala perubahan sikap, prilaku dan tindakan politik untuk memperoleh

kekuasaan tersebut. Termasuk disini perubahan pandangan terhadap posisi diri (*self-image*) dihadapan masyarakat atau kondisi struktural-kultural yang melingkupinya dan pencapaian sumberdaya-sumberdaya yang kasat mata (*tangible*) seperti uang dan tempat tinggal dan tidak kasat mata (*intangible*) seperti informasi, dukungan sosial, yang diperoleh dalam kondisi struktural tertentu (Lambang Trijono, 2002; 1).

Pemberdayaan Ekonomi Sektor Informal

Salah satu sebab runtuhnya ekonomi nasional saat ini adalah tidak berdayanya rakyat dan negara dalam menghadapi hantaman globalisasi. Hal ini didukung pula kurang konsistennya perhatian negara pada basic perekonomian sebagian besar masyarakat yang bertumpu pada sektor informal. Untuk mengatasi kendala ekonomi tersebut salah satu cara alternatifnya adalah perlunya pemberdayaan rakyat melalui sektor informal.

Kemiskinan dan ketidakberdayaan merupakan kenyataan sosial yang masih menyertai setiap hasil pembangunan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan ketidakberdayaan dikaitkan dengan kondisi politis dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mengungkapkan aspirasinya dalam struktur politik tertentu. Kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah 2 hal yang kait mengait, yang satu dapat mengakibatkan yang lain atau sebaliknya, sehingga cara

menanggulangnya juga harus komprehensif dan multidimensional. (Heru Nugroho, 2001; 200).

Dengan demikian bahwa reorientasi pembangunan dengan memusatkan pemihakan kepada pemberdayaan rakyat bukan sekedar menyusun konsep yang lebih baru dan terpadu. Lebih dari itu pemihakan ekonomi rakyat juga berarti harus disertai dengan upaya identifikasi terhadap faktor lingkungan yang selama ini merefresh keberadaannya, disamping konsekwensi adanya metoda gerakan yang benar-benar harus tumbuh dan berkembang atas inisiatif rakyat dimana partisipasi merupakan bagian inheren .

Menurut Diana Conyers, bahwa minimal terdapat tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting, *Pertama* partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, karena partisipasi merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. (Diana Conyers, 1991; 154-155).

Tampak bahwa formulasi pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut tidaklah sekedar bergerak pada dimensi ekonomi, melainkan dalam banyak level kebijakan pemihakan ekonomi rakyat adalah adanya upaya “politik” yang berani dari pemerintah untuk secara

transparan memberi jalan dan penguatan bagi berlangsungnya proses pemihakan itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai bagian dari unsur ekonomi rakyat, problema sektor informal juga tidak jauh dari persoalan di atas. Bahwa secara ideologis, wacana transformatif masih belum banyak masuk dalam benak mereka, bahwa terhambatnya proses kemajuan usaha bukan saja diakibatkan oleh terbatasnya modal dan rendahnya keterampilan, melainkan juga adanya kebijakan pemerintah (baik di level pusat dan daerah) yang memang cenderung kurang menghendaki keberadaan mereka.

Secara organisasi, pelaku sektor informal juga belum memiliki manajemen usaha yang belum bisa membuat mereka bekerja efisien (ke dalam) dan memiliki daya tawar (ke luar). Secara ekonomi, faktor keterbatasan modal dan akses terhadap pasar merupakan kendala akut yang belum bisa tertanggulangi selama ini. Secara *network*, mereka juga belum bisa mengorganisir dengan dunia luar (bahkan diantara mereka sendiri) akibat adanya hambatan dan rintangan dari negara yang tidak membolehkan mereka berkelompok (membentuk suatu komunitas). Serta juga selama ini belum banyak terdapat upaya untuk perlindungan hukum atau advokasi yang tumbuh dari dalam sektor formal itu sendiri. Umumnya kebanyakan advokasi yang terjadi adalah karena adanya pihak luar yang merasa peduli dengan nasib pelaku sektor informal seperti; mahasiswa, LSM, dan kaum intelektual.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah memberikan tawaran alternatif dalam menanggulangi problema

kemiskinan dan ketidakberdayaan melalui pendayaangunaan peran institusi-intituti mediasi yang tersedia dalam masyarakat. institusi-intituti mediasi ini terdapat dalam setiap masyarakat namun keberadaannya kadang-kadang terabaikan atau terkooptasi oleh kekuatan politik dominan yang berkuasa.

Kondisi fenomena yang tersebut di atas menggambarkan betapa untuk memberdayakan (*empowering*) pelaku sektor informal diperlukan upaya menyeluruh meliputi tersedianya kebijakan yang memihak keberdaannya, pengelolaan proporsi aktivitas ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya, pengorganisasian sebagai sarana penguatan politik, dan metoda pembinaan yang lebih partisipatif.

Seluruh upaya tersebut merupakan kesatuan yang utuh yang saat ini perlu disosialisasikan kepada pelaku sektor informal sendiri dan pengambilan kebijakan untuk membangun atau menyemangati kehidupannya. Dengan sendirinya, disini tidak banyak lagi ruang yang dapat diberikan kepada pengambil kebijakan untuk memandang keberadaan sektor informal sebagai entitas ekonomi yang hanya bisa menyumbang ketidaktertiban dan kekumuhan kota, melainkan harus dilihat sebagai komunitas yang potensial untuk membangun jaringan perekonomian (rakyat). Seluruh argumentasi tersebut dalam perjalanannya harus didukung tidak cuma oleh kelayakan akademis, melainkan juga berdasarkan kepada komitmen empiris yang bisa dicermati dari pelaksanaannya di lapangan.

Kemudian, keberadaaan institusi-intituti mediasi merupakan lembaga sosial yang memiliki posisi diantara

wilayah kehidupan individu yang bersifat privat dengan lembaga-lembaga sosial makro yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Dilihat dalam konteks kehidupan kultur politik liberal, institusi-institusi mediasi merupakan sarana untuk pemberdayaan individu-individu agar mereka tidak mengalami alienasi atau keterasingan dalam menghadapi *the bigness* atau realitas makro. Keberadaan realitas sosial yang serba makro ini merupakan ciri utama dari aktivitas lembaga-lembaga modern, seperti korporasi perusahaan-perusahaan raksasa, konglomerasi dan kolusi kaum pemilik kapital, organisasi tenaga kerja dengan skala besar, birokrasi dan administrasi negara, partai-partai politik dan profesi lain yang terorganisir. Realitas makro tersebut cenderung mengalienasikan dan mensubordinasikan individu karena tidak menolong dalam proses pemaknaan dan pengidentifikasian individu.

Disamping itu, perlu adanya pendekatan penyadaran transformatif terhadap pemaknaan sektor informal tersebut dalam realitas kehidupan ekonomi. Seperti tiadanya modal, rendahnya keterampilan, dan kurangnya akses terhadap pasar. Realitas kondisi ekonomi ini harus ditransformasikan secara jernih, bahwa seluruh kondisi tersebut pertama-tama bukan diakibatkan kurangnya etos kerja dan jenis pekerjaan yang dipilih melainkan disebabkan oleh adanya kebijakan yang cenderung memarjinalisasikan sektor informal serta lebih mengayomi jenis usaha yang formal, besar, canggih, dan modern.

Penutup

Pada akhirnya, telah menjadi jamak, harus disadari bahwa komunitas sektor informal memiliki kehidupan dan karakteristiknya sendiri berbeda dengan jenis usaha lainnya (sektor formal). Ini berarti bahwa setiap upaya perubahan kebijakan maupun penguatan jenis usaha sektor informal bukan lantas hendak diarahkan kepada suatu kondisi yang justru menghilangkan warna sektor informal itu sendiri. Peringatan ini sangat penting, mengingat selama ini terdapat banyak kebijakan yang kelihatannya membantu bagi pengembangan sektor informal, seperti formalisasi usaha, tanpa disadari sebenarnya hal itu malah mematikan usaha mereka.

Formalisasi usaha dengan dibuat tempat-tempat yang hampir menyerupai (misalnya) toko-toko mengakibatkan terdongraknya harga jual produksi sektor informal, karena mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk sewa tempat usaha tersebut. Belum lagi pola interaksi antara produsen dan konsumen menjadi lebih formal (kaku), pada hal salah satu ciri sektor informal adalah pola interaksi yang kuat antara penjual dan pembeli, seperti dimungkinkan adanya saling tawar menawar harga produk. Hilangnya nuansa seperti itu secara pelan-pelan akan membuat komunitas sektor informal ditinggalkan oleh pelanggannya, karena tidak ada bedanya dengan pusat perbelanjaan lainnya.

Dari pemaparan argumentasi di atas penulis yakin bahwa ketidakberdayaan sektor formal bukan karena “ketidakcerdasan teknis” dari para pelaku sektor informal dalam

menjalankan kegiatan ekonominya. Melainkan karena kesalahan struktural yang terus diproduksi oleh pemerintah demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat (pengusaha besar) yang kebetulan memiliki akses untuk memaksakan suatu kebijakan.

Daftar Pustaka

- Breman, Jan, *Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal*, YOP, Jakarta, 1991.
- Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1991.
- Friedmann, John, *Empowerment: The Politic of Alternative Development*, Blackwell Publishers Massachusetts, 1992.
- Lumban, Magdalena, *Sektor Informal Indonesia*, Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 14, Jakarta, 1991.
- Nugroho, Heru, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Rahayu, A.B., 2006. *Makalah Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*, [Http://www.binaswadaya.org/files/](http://www.binaswadaya.org/files/).
- Trijono, Lambang, *Teori dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Dalam Materi Kuliah Teori dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, 2002, Tidak di publikasikan.
- Wrihatnolo, R.R. dan Riant Dwidjowidjoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Pantuan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2007.